



## Daftar Pustaka

### Buku, Artikel Ilmiah

- Asmara, Galang, 2006, *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gezeling) dalam Hukum Pajak di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Brotodihardjo, Santoso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Djafar Saidi, Muhammad, 2011, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dwi Nugroho, Adrianto, 2010, *Hukum Pidana Pajak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2016, *Beban Target Penerimaan Pajak*, Rubrik Opini Harian Kompas tanggal 4 Januari 2016.
- \_\_\_\_\_, 2015, *Mengawasi Amnesti Pajak*, Rubrik Opini Harian Kompas tanggal 20 November 2015.
- HS, Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B., 2012, *Manajemen Sengketa dalam Pungutan Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Mas, Marwan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Ketiga)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia (edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Teori Hukum (edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.



Mury Kurniawan, Anang, 2011, *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Nahak, Simon, 2014, *Hukum Pidana Perpajakan*, Setara Press, Malang.

Pudyatmoko, Y.Sri, 2005, *Pengadilan Pajak dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sumardjono, Maria, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Syamsah, Tiasim Nung, 2011, *Tindak Pidana Perpajakan*, Alumni, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2006, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189).



### Sumber dari Internet

<http://www.antikorupsi.org>, Data diakses tanggal 1 Februari 2016,  
<http://www.antikorupsi.org/id/doc/rancangan-undang-undang-pengampunan-nasional-2015>

<http://www.kemenkeu.go.id>, Data diakses tanggal 4 Maret 2016,  
<http://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/budget-brief-apbn-p-2015>

<http://www.detik.com>, Data diakses tanggal 4 Maret 2016  
<http://finance.detik.com/read/2016/01/11/112617/3115155/4/hasil-akhir-penerimaan-pajak-2015-rp-1060-triliun>

<http://www.setpp.depkeu.go.id>, Data diakses tanggal 4 Maret 2016  
<http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Statistik/StatBerkas.asp>

\_\_\_\_\_, Data diakses tanggal 4 Maret 2016  
<http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/Board/Hakim.asp>